

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai populasi penduduk yang sangat tinggi bila dibandingkan dengan negara Filipina. Dilansir melalui berita online Okezone, Indonesia dinobatkan sebagai negara dengan penduduk terbanyak keempat antara negara-negara ASEAN dengan jumlah penduduk sebanyak 265 juta jiwa bila dibandingkan dengan negara Brazil dengan jumlah penduduk terbanyak kelima yaitu 209 juta jiwa (Okezone, 2018). Populasi penduduk di Indonesia menjadi permasalahan yang serius bagi pemerintah daerah tentang besarnya jumlah penduduk yang dikehendaki dan usaha yang dilakukan Pemerintah daerah untuk merangsang maupun memperlambat pertumbuhan penduduk (Tatuhe dkk, 2016). Daerah yang mempunyai tingkat kepadatan penduduk yang tinggi biasanya terjadi di daerah-daerah perkotaan dimana banyaknya para urban yang mendatangi kota-kota tersebut sebagai daerah yang memiliki mobilitas tinggi yang menjadi pusat dalam setiap daerah. Kota sebagai pusat kegiatan politik, ekonomi, sosial dan budaya yang mempunyai ketersediaan akses yang sangat mudah didapatkan oleh masyarakat di daerah perkotaan. (Chistiani dkk, 2014)

Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui program KB sebagai salah satu inovasi pemerintah daerah. Oleh karena itu menurut Rahma (2016) tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi

disebabkan masih tingginya tingkat kelahiran di satu pihak dan lebih cepatnya penurunan tingkat kematian dilain pihak. Pada tahun 2016 hingga 2018 jumlah kelahiran per Kecamatan Kota Yogyakarta yaitu 4.424 jiwa. Hal ini yang menyebabkan jumlah penduduk Indonesia terus meningkat dengan pesat disamping tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi dan struktur umur penduduk yang kurang seimbang. Masalah lainnya adalah penyebaran penduduk yang juga kurang merata di beberapa daerah yang disebabkan oleh keadaan geografis yang berbeda-beda disetiap daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa kependudukan merupakan hal yang ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat. Selain itu, dijelaskan juga dalam undang-undang pada pasal 1 ayat 3 bahwa perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk.

Seperti dalam penelitian Riyono (2014), Kota Yogyakarta merupakan salah satu wilayah yang pesat perkembangannya khususnya dalam hal kependudukan. Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal dengan predikat kota pelajar, kota wisata, dan kota budaya yang akan memberikan dampak pada peningkatan jumlah pertumbuhan penduduk setiap tahunnya. Berikut data jumlah penduduk Kota Yogyakarta pada tahun 2016 hingga 2018 yaitu :

Tabel 1. 1 Rekapitulasi Jumlah Penduduk WNI Kota Yogyakarta

Tahun	Penduduk		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2016	200.595	210.687	411.282
2017	201.296	211.396	412.692
2018	201.395	211.331	412.726

Sumber : Data Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta (2018)

Berdasarkan data pada tabel diatas mendeskripsikan bahwa laju pertumbuhan penduduk Kota Yogyakarta mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Pada tahun 2016 hingga 2017 jumlah penduduk mengalami peningkatan sebesar 1.410 jiwa. Sedangkan pada tahun 2017 hingga 2018 jumlah penduduk hanya mengalami peningkatan sebesar 34 jiwa. Pertambahan penduduk di Kota Yogyakarta ini terjadi baik karena kelahiran, kematian maupun imigrasi dengan demikian akan terjadi peningkatan berbagai macam tuntutan kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana, yang akan berpengaruh pula pada kepadatan penduduk (Riyono, 2014). Pemerintah daerah harus melakukan tindakan agar dapat meminimalisir jumlah pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, dan salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu memaksimalkan peranan badan atau instansi yang kompeten dalam menangani masalah pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat.

Proses meminimalisir pertumbuhan penduduk salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta yaitu membentuk Kampung

Keluarga Berencana (KB). Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mempunyai fungsi sebagai pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Maka dilansir melalui berita online Tribun Jogja, sebagai salah satu inovasi pengendalian pertumbuhan penduduk di Kota Yogyakarta Kampung KB merupakan satuan wilayah setingkat RW, Dusun atau setara dengan kriteria tertentu dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat. (Tribunnews, 2018)

Program kampung KB (2017) merupakan salah satu terobosan yang di desain khusus untuk menggerakkan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di tingkat dusun atau kampung yang pemilihannya berdasarkan kriteria dari Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional sehingga masing-masing wilayah Kampung KB memiliki karakteristik yang berbeda. Faktor yang melatarbelakangi terpilihnya Kampung KB adalah rendahnya peserta KB dan banyak remaja yang menikah dini di wilayah kumuh, daerah aliran sungai, kawasan miskin perkotaan dan padat penduduk. (Kampung KB, 2017)

Dilansir melalui berita online Nasional Republika, dibentuknya Kampung KB di Kota Yogyakarta pada tahun 2016 yakni di RW 12 Kelurahan Prawirodirjan, Kecamatan Gondomanan. Selanjutnya pada tahun 2017 telah bertambah sebanyak 13 Kampung KB berbasis rukun warga (Nasional Republika, 2017). Diantara 14 Kampung KB yang telah diresmikan di Kota Yogyakarta peneliti memilih RW 12 Kelurahan Prawirodirjan, Kecamatan Gondomanan dengan jumlah unmeet need tertinggi dan jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Gondomanan, berikut data

jumlah penduduk Kecamatan Gondomanan dimulai tahun 2016 hingga 2019 seperti berikut :

Tabel 1. 2 Rekapitulasi Jumlah Penduduk WNI Per Kelurahan Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta

Tahun	Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	jumlah
2016	Ngupasan	2774	2959	5733
	Prawirodirjan	4577	4779	9356
2017	Ngupasan	2755	2919	5674
	Prawirodirjan	4587	4788	9375
2018	Ngupasan	2751	2912	5663
	Prawirodirjan	4560	4779	9339

Sumber data : Sumber : Data Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta (2018)

Berdasarkan data di atas memperlihatkan jumlah penduduk Kelurahan Prawirodirjan memiliki jumlah penduduk yang banyak dibandingkan dengan Kelurahan Ngupasan. Terlihat sejak tahun 2016 hingga 2018 Kelurahan Prawirodirjan mengalami peningkatan jumlah penduduk dengan jumlah penduduk yang tidak terlalu signifikan. Sehingga hal ini berguna untuk melihat peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui program Kampung KB yang telah ditetapkan di RW 12 Kelurahan Prawirodirjan.

Mengutip hasil wawancara berita online Antara Jogja dengan ketua Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Eny Retnowati di Yogyakarta, bahwa pembentukan Kampung KB merupakan instruksi dari Pemerintah Pusat sejak 2016. Kampung KB yang berada di RW 12 Kelurahan Prawirodirjan Kecamatan Gondomanan terpilih menjadi salah satu RW yang justru merupakan wilayah yang memiliki tingkat partisipasi KB rendah, serta masuk dalam daerah

miskin atau berada di lokasi yang dinilai kumuh. Upaya untuk mewujudkan keluarga berkualitas melalui Kampung KB tersebut diantaranya ditempuh dengan menghidupkan berbagai kegiatan pembinaan di kampung seperti pembinaan keluarga balita, kegiatan untuk konseling remaja hingga kegiatan untuk lansia.

Tingginya angka *unmet need* di RW 12 Kelurahan Prawirodirjan merupakan salah satu permasalahan yang menjadikan salah satu kriteria ditetapkannya Kampung KB pertama di RW 12 Kelurahan Prawirodirjan. Kondisi ini yang membuat pengendalian pertumbuhan penduduk melalui program Kampung KB bisa diatasi dengan megisyaratkan keinginan pasangan usia subur yang tidak ingin mempunyai anak lagi atau ingin menjarangkan kehamilan untuk menggunakan alat atau metode kontrasepsi.

Berdasarkan uraian diatas maka dari itu penulis akan melakukan penelitian terkait dengan peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2018.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui program Kampung KB di Kelurahan Prawirodirjan Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pengendalian pertumbuhan penduduk

melalui program Kampung KB di Kelurahan Prawirodirjan Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademik

Secara akademik penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru mengenai peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui program Kampung KB sebagai rujukan dalam kegiatan akademik. Kajian yang terkait dengan kegiatan akademik ini sebagai rujukan mata kuliah birokrasi pemerintah yang diharapkan penelitian ini dapat mendeskripsikan pemerintahan yang memiliki fungsi, peran dan wewenang dalam melaksanakan pelayanan publik dan juga sebagai pelaksana pembangunan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini agar memberi kontribusi kepada :

- a. Bagi pemerintah daerah, agar menjadi salah satu referensi bagi pemerintah daerah Kota Yogyakarta dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui program Kampung KB.
- b. Bagi masyarakat, agar masyarakat ikut berpartisipasi guna melancarkan urusan pemerintah dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui program Kampung KB di Kelurahan Prawirodirjan Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta.

- c. Bagi mahasiswa, agar mengetahui peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk di Kota Yogyakarta.

1.5 Studi Terdahulu

(Tatuhe dkk, 2016) menyatakan bahwa memiliki jumlah penduduk yang ada masih sedikit dan masih bisa terkendali oleh pemerintah daerah. Beberapa faktor penghambat dalam mengatasi masalah laju pertumbuhan penduduk yaitu pernikahan yang terjadi di usia dini, dekatnya jarak kelahiran anak karena kurang memaksimalkan program pemerintah yaitu penggunaan alat kontrasepsi. Dalam hal ini salah satu upaya pemerintah daerah melalui Badan Keluarga Berencana dalam mengatasi hambatan yang ada agar diharapkan dapat mempertahankan jumlah penduduk di Kabupaten Kepulauan Taulud agar tidak menambah jumlah penduduk yang tinggi dari tahun ke tahunnya.

(Rahmeina F, 2018) menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi di Kota Pekanbaru, maka hal ini perlu dirintis usaha untuk mengendalikan tingkat pertumbuhan penduduk terutama melalui pengendalian tingkat kelahiran yang dilaksanakan melalui program Keluarga Berencana (KB). Terdapat empat kelurahan yang telah terpilih sebagai kampung KB, akan tetapi pada pelaksanaannya program Kampung KB belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini terlihat dari belum terlaksananya program Kampung KB, kurangnya koordinasi dari para aparat pelaksana program, anggaran yang belum memadai dalam pelaksanaan Kampung KB dan kurangnya Advokasi ke lintas sektoral.

(Diro dkk, 2016) menyatakan bahwa tingginya tingkat pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sidoarjo jika terus dibiarkan, maka akan terjadi berbagai masalah yang akan berpengaruh pada dampak sosial dan dampak ekonomi. Kemudian muncul program KB yang ditangani oleh BPMPKB dalam menanggulangi tingkat pertumbuhan penduduk. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk menekan pesatnya pertumbuhan penduduk yaitu, menggalakkan program Keluarga Berencana untuk membatasi jumlah anak dalam suatu keluarga secara umum dan masal, sehingga akan mengurangi jumlah angka kelahiran yang tinggi.

(Jusliati dkk, 2018) menyatakan bahwa masalah sosial yang ada di masyarakat bisa diatasi jika adanya pemerataan kesejahteraan sosial yang benar-benar merata. Maka tidak heran jika program KB menjadi salah satu program dalam mensejahterakan masyarakat juga dapat mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Berdasarkan hasil penelitian, hambatan dari tingkatnya angka kelahiran dan kematian kini sudah dapat terkendali karena adanya efektivitas program Keluarga Berencana (KB) di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang telah berjalan dengan baik dan tepat pada sasaran. Akan tetapi masih terdapat hambatan yang dirasakan yaitu pada calon peserta KB itu sendiri yang masih memiliki pola pikir yang sederhana dan acuh terhadap kesehatan ibu dan anak.

(Bachtiyar dkk, 2017) menyatakan pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui BPMPKB (Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana) mencanangkan Kampung Keluarga Berencana di Dusun Ambeng, Desa Ngingas, Kecamatan Waru, Sidoarjo. Desa Ngingas terpilih karena wilayah padat penduduk dan juga padat industri juga pencapaian MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka

Panjang) sangat rendah. Tujuan umum program ini telah tercapai, akan tetapi ada beberapa tujuan khusus dalam program ini yang belum terlaksana, diantaranya yaitu Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK) Remaja. Hal ini dikarenakan sulitnya mencari remaja yang mau berpartisipasi dalam program ini.

(Lestari, 2015) menyatakan bahwa keberhasilan program KB menekankan pada pencapaian tujuan demografi yakni untuk mencapai target penurunan laju pertumbuhan penduduk dengan mengatur kelahiran. Adapun salah satu metode pengaturan kelahiran adalah dengan penggunaan metode-metode kontrasepsi. Data hasil penelitian yang telah disajikan dapat disimpulkan bahwa Metode KB Jangka Panjang (MKJP) yang paling banyak dipergunakan khususnya di Provinsi Jawa Timur adalah metode Alat Kontrasepsi dalam Rahim (AKDR) yang dipergunakan oleh kaum perempuan. Metode AKDR mempunyai cara kerja yang sangat efektif yaitu selain untuk masa penggunaan yang panjang yakni bukan hanya bulanan tapi sampai dengan kurun tahunan.

(Raikhani dkk, 2018) menyatakan bahwa dari hasil analisis faktor yang mempengaruhi keberhasilan program Kampung KB adalah variabel sumber daya dengan indikator penguasaan materi, kualitas pendampingan, dan keterlibatan Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah desa sebagai pendukung kegiatan. Disamping itu Dinas BPPKB dalam melakukan intervensi melalui pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan skill masyarakat dilakukan secara rutin ditengah keterbatasan anggaran. Komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap tingkat keberhasilan program Kampung KB.

(Singon, 2018) menyatakan bahwa kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilihat dari lima aspek yaitu dari segi produktivitas sudah cukup baik dan sudah sesuai dengan SOP. Kemudian pada kualitas layanan sudah cukup baik, karena setiap kegiatan yang dilaksanakan Dinas telah terprogram dan terjadwal. Pada aspek responsivitas sudah cukup baik, petugas lapangan atau pegawai selalu turun ke masyarakat dengan memberi pembinaan, memberi alat, dan obat KB yang di butuhkan. Pada aspek responsibilitas sudah baik, karena setiap pegawai dalam menjalankan setiap program kerja sudah bertanggung jawab sesuai dengan aturan. Selanjutnya pada aspek akuntabilitas sudah cukup baik, di lihat dari aturan dan norma serta etika pelayanan pada setiap program dan kegiatan sudah cukup terbuka melalui media massa atau elektronik.

(Syah, 2017) menyatakan bahwa persepsi tentang program keluarga berencana dalam pengendalian kependudukan diikuti oleh 80% ibu pasangan usia subur. Masyarakat Kelurahan Besulutu setuju dengan adanya program KB ini karena dengan memiliki dua anak akan mempermudah mereka dalam mengatur dan membina anak serta akan lebih efisien untuk biaya pendidikan, juga tidak terhalang oleh kaidah-kaidah adat dan tidak dilarang dalam agama serta tidak memiliki efek samping bagi kesehatan ibu. Akan tetapi sebagian masyarakat disana menganggap bahwa slogan dua anak lebih baik merasa bahwa jumlah anak sangat menentukan masa depan keluarga.

(Lestari dkk, 2018) menyatakan bahwa strategi yang dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mengkampanyekan pendewasaan usia perkawinan lebih mengutamakan strategi yang ramah remaja

yaitu dengan pembentukan kelompok PIK R / M (Pusat Informasi dan Konseling Remaja/ Mahasiswa) yang di dalam kelompok PIK tersebut sudah terdapat kegiatan atau program kerja sesuai dengan karakter remaja yang tujuan akhirnya membentuk remaja menjadi pendidik sebaya dan konselor sebaya yang tugasnya untuk menyebarluaskan informasi tentang Program Genre. Kemudian dibentuk kelompok BKR (Bina Keluarga Remaja) yang di fokuskan terhadap keluarga remaja atau keluarga yang masih memiliki remaja, dengan dilakukan penyuluhan, seminar, serta pelatihan di sekolah-sekolah.

Tabel 1. 3 Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul	Tahun	Isi	Jurnal
1.	Steffhen Tatuhe, dkk.	Peranan Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk (Suatu Studi di Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kepulauan Talaud	2016	Pemerintah daerah memiliki peran utama dalam mengatasi masalah laju pertumbuhan penduduk dengan menghadapi faktor penghambat yaitu pernikahan yang terjadi di usia dini serta dekatnya jarak kelahiran anak.	Administrasi Publik, Vol. 1 (37)
2.	Fauziah Riska Rahmeina	Koordinasi dalam Program Kampung KB di Kota Pekanbaru	2018	Koordinasi yang tidak baik dari para aparat pelaksana program akan mengakibatkan pelaksanaan program tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini juga disebabkan	Jom Fisip, Vol. 5 (1)

				karena anggaran yang belum memadai dalam pelaksanaan Kampung KB dan Kurangnya Advokasi ke Lintas sektoral.	
3.	Ana Diro	Implementasi Kebijakan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Sidoarjo	2016	Implementasi kebijakan yang dilakukan melalui program Keluarga Berencana sebagai tindakan dalam membatasi jumlah anak dalam suatu keluarga secara umum dan masal, sehingga akan mengurangi jumlah angka kelahiran yang tinggi.	Kebijakan dan Manajemen Publik, Vol. 2 (1)
4.	Jusliati, dkk.	Pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang	2018	Angka kelahiran dan kematian kini sudah dapat terkendali dengan adanya efektivitas program Keluarga Berencana (KB). Hambatan yang dirasakan pada calon peserta KB yang masih memiliki pola pikir yang sederhana dan acuh terhadap kesehatan ibu dan anak.	Administrasi Publik, Vol. 4 (1)
5.	Nosa Arghi Bachtiyar	Implementasi Program Kampung Keluarga	2017	Implementasi program Kampung KB pada	Dinamika <i>Governance</i> , Vol. 7 (1)

	dan Sri Wibawani	Berencana Di Dusun Ambeng-Ambeng Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo		terlaksananya program Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK) belum tercapai dengan hambatan sulitnya mencari remaja yang ingin berpartisipasi dalam program ini.	
6.	Yuni Lestari	Pengendalian penduduk Melalui Metode Kontrasepsi Jangka Panjang di Provinsi Jawa Timur	2015	Metode AKDR mempunyai cara kerja yang sangat efektif yaitu selain untuk masa penggunaan yang panjang, akan sangat membantu program pemerintah dalam menggalakan program pengendalian laju pertumbuhan penduduk.	Studi Perempuan, Vol. 11 (12)
7.	Agus Raikhani, dkk.	Analisis Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Program Kampung KB di Kabupaten Jombang	2018	Komunikasi, sumber daya, kontribusi, dan struktur birokrasi secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap tingkat keberhasilan program Kampung KB.	Pendidikan Ekonomi, Vol. 1 (1)
8.	Hariyant Hamongon Singon dan Rully Mambo	Kinerja Dinas Pengendalian Pertumbuhan Penduduk dan Keluarga	2018	Menilai kinerja Dinas pada lima aspek yaitu produktivitas, kualitas layanan, resvonsitas,	Administrasi Publik, Vol. 4 (49)

		Berencana Kota Manado		responsibilitas, dan akuntabilitas yang dirasa cukup baik dalam kontribusi program kerja.	
9.	Syah Kriswan dan Surdin	Persepsi tentang Program Keluarga Berencana dalam Pengendalian Kependudukan pada Ibu Pasangan Usia Subur di Kelurahan Besuluru Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe	2017	Mengukur persepsi ibu pasangan subur pada pelayanan Keluarga Berencana (KB) dirasa cukup berperan dalam mengatur dan membina anak dengan persepsi pada kurangnya minat masyarakat jumlah anak sangat menentukan masa depan keluarga.	Pendidikan Geografi, Vol. 1 (1)
10.	Puji Lestari dan Eli Purwati	Strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Mengkampanyekan Pendewasaan Usia Perkawinan terhadap Remaja Ponorogo 2017	2018	Strategi ramah remaja dengan pembentukan kelompok PIK R / M (Pusat Informasi dan Konseling Remaja/ Mahasiswa) dengan tujuan membentuk remaja menjadi pendidik sebaya dan konselor sebaya kemudian dibentuk kelompok BKR (Bina Keluarga Remaja) di fokuskan terhadap	<i>Government and Communication Studies</i> , Vol. 1 (1)

				keluarga remaja atau keluarga yang masih memiliki remaja.	
--	--	--	--	--	--

(Sumber : diolah oleh penulis 2019)

Dari beberapa penelusuran yang peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan penelitian tentang peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui program Kampung KB di Kelurahan Prawirodirjan Kecamatan Gondomanan merupakan penelitian yang baru dan belum dilakukan sebelumnya. Pada uraian *literature review* terpapar jelas bahwa belum ada yang mengambil penelitian program Kampung KB sebagai salah satu peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk.

Hal tersebut dijelaskan pada penelitian kali ini yang hanya terfokus pada peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengenai program Kampung KB sebagai salah satu program pemerintah dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk Kota Yogyakarta yang semakin meningkat dari tahun ke tahun dengan jumlah penduduk yang tidak menentu. Kajian sebelumnya hanya menjelaskan pada kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilihat dari lima aspek penilaian. Lebih dalam lagi kajian sebelumnya hanya menjelaskan pada inovasi pemerintah daerah dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui program penggunaan Alat Kontrasepsi Jangka Panjang (AKJP).

Hal ini berguna untuk melihat peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk dengan

memprediksi pada pelaksanaan program Kampung KB sebagai salah satu program pemerintah dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk pada masa mendatang. Oleh sebab itu penelitian ini akan terfokus dengan judul peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2018.

1.6 Kerangka Dasar Teori

1.6.1 Peran

A. Definisi Peran

Peran berarti laku, bertindak. Dalam kamus besar bahasa Indonesia peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Menurut Harahap (dalam Putra, 2014) menyatakan bahwa makna peran yang dijelaskan dalam status, kedudukan dan peran dalam masyarakat, dapat dijelaskan melalui beberapa cara, yaitu pertama penjelasan historis. Kedua, pengertian peran menurut ilmu sosial.

Menurut wirutomo (dalam Hestia, 2014) menyatakan bahwa peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Peranan didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan yang lain.

Menurut Soekanto (dalam Zarkasi, 2017) menyatakan bahwa Peranan berasal dari kata peran. Peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Sedangkan peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan keduanya tak dapat dipisah-pisahkan.

Menurut Role (dalam Marya, 2012) menyatakan bahwa apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia dikatakan menjalankan suatu peran. Peranan itu sendiri lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, tepatnya adalah bahwa seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

B. Jenis Peran

Menurut Arimbi (dalam Handayani, 2018) mengemukakan beberapa jenis dimensi peran sebagai berikut:

- 1) Peran sebagai suatu kebijakan, penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.

- 2) Peran sebagai strategi, penganut paham ini mengendalikan peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (*public supports*).
- 3) Peran sebagai alat komunikasi, peran di dayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan, persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsive dan responsibel.
- 4) Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada.
- 5) Peran sebagai terapi, menurut persepsi ini peran dilakukan sebagai upaya mengobati masalah-masalah psikologis masyarakat seperti hanya perasaan ketidakberdayaan (*sense of powerlessness*), tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

Selain jenis dimensi peran diatas, menurut Sucipto (dalam Nurudin, 2017) menyatakan bahwa jenis-jenis peranan berdasarkan jenis-jenisnya dapat diklasifikasikan beberapa macam, antara lain:

- 1) Peranan yang diharapkan (*Expected Roles*) dan Peranan yang disesuaikan (*Aktual Roles*).
- 2) Peranan Bawaan (*Ascribed Roles*) dan Peranan Pilihan (*Achieved Roles*).
- 3) Peranan Kunci (*Key Roles*) dan Peranan Tambahan (*Supplementary Roles*).

- 4) Peranan Golongan dan Peranan Bagian.
- 5) Peranan Tinggi, Peranan Menengah, Peranan Rendah.

C. Indikator Peran

Menurut Rizzo (dalam Dzikri, 2017) menyatakan bahwa peran diukur menggunakan indikator-indikator. Adapun penjelasan di bawah ini :

- 1) Wewenang, yaitu merasa dengan pasti seberapa besar wewenang yang dimiliki dan mempunyai rencana yang jelas untuk pekerjaan.
- 2) Tanggung jawab, yaitu mempunyai tujuan yang jelas untuk pekerjaan dan mengetahui bahwa perlunya membagi waktu dengan tepat.
- 3) Kejelasan tujuan, yaitu apa yang menjadi tanggung jawab dan penjelasan tentang apa yang harus dikerjakan adalah jelas.
- 4) Cakupan pekerjaan, yaitu mengetahui dari pekerjaan dan bagaimana kinerjanya dievaluasi.

D. Peran Pemerintah Daerah

a) Pengertian Pemerintah Daerah

Sarundajang (2002) mengemukakan bahwa kehadiran pemerintahan dan keberadaan pemerintah adalah sesuatu yang menjadi keharusan bagi proses kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Sejarah telah membuktikan bahwa masyarakat, sekecil apapun kelompoknya, bahkan sebagai individu sekalipun, membutuhkan pelayanan pemerintah. Oleh karena itu kehidupan sehari-hari erat hubungannya dengan fungsi-fungsi pemerintah didalamnya.

Definisi Pemerintahan Daerah di dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal utama didalamnya. Pertama, pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Kedua, Pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut. Ketiga, dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun DPRD. (Retnami, 2001)

b) Fungsi Pemerintah Daerah

Fungsi pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah menjalankan, mengatur, dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 sebagai berikut:

- 1) Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- 2) Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
- 3) Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

c) Asas Pemerintah Daerah

Ardiansyah (2015) mengemukakan beberapa penyelenggaraan urusan pemerintahan khususnya pemerintahan daerah, sangat berkaitan erat dengan beberapa asas dalam pemerintahan suatu negara, sebagai berikut:

1) Asas Sentralisasi

Asas sentralisasi adalah sistem pemerintahan dimana sistem pemerintahan dimana segala kekuasaan dipusatkan di pemerintah pusat.

2) Asas Desentralisasi

Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3) Asas Dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah kepada instansi vertikal wilayah tertentu.

4) Asas Tugas Pembantuan

Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa; dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau desa; serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk tugas tertentu.

E. Peran Dinas

a) Pengertian Peran Dinas

Soerjono Soekanto (1987) mengemukakan definisi peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Hal ini menyatakan bahwa seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan ini diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam lingkungan masyarakat.

Poerwodarminta (1995) mengemukakan bahwa peran merupakan fungsi penyesuaian yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat. Apabila konsep tersebut dikaitkan dengan fungsi pemerintah maka, dapat disimpulkan definisi peran adalah organisasi pemerintah yang menjalankan tugas-tugas negara dan fungsi-fungsi pemerintahan daerah di Kota Yogyakarta dalam hal ini adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah pada pasal 24 yang mengatur mengenai Dinas yaitu:

- a. Dinas Daerah melakukan unsur pelaksana otonomi daerah.
 - b. Dinas Daerah dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah.
 - c. Kepala Dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.
- b) Fungsi Dinas

Berdasarkan Perwal No. 65 Tahun 2016 Pasal 5 untuk melaksanakan tugas, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- e. Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan.
- f. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

1.6.2 Pengendalian Pertumbuhan Penduduk

A. Definisi Penduduk

Dinata (2016) menyatakan bahwa penduduk adalah orang atau orang-orang yang mendiami suatu tempat (kampung, negara, dan pulau) yang tercatat sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku di tempat tersebut. Berdasarkan tempat lahir dan lama tinggal penduduk suatu daerah dapat dibedakan menjadi empat golongan, yaitu penduduk asli, penduduk pendatang, penduduk sementara, dan tamu.

Malthus (dalam Nurul, 2015) mengemukakan suatu pendapat yang tercantum dalam bukunya yang berjudul "*Essay On The Principle of Population*"

yaitu penduduk akan selalu bertambah lebih cepat dibandingkan dengan penambahan bahan makanan, kecuali terhambat oleh karena apa yang ia sebutkan sebagai moral *restrains*, seperti misalnya wabah penyakit atau malapetaka. Pertumbuhan penduduk juga dapat diartikan sebagai perubahan dalam bilangan penduduk sepanjang masa, yang boleh dikira sebagai perubahan bilangan individu dalam sebuah populasi.

Penduduk merupakan salah satu objek kajian yang dipelajari dalam ilmu geografi. Menurut Mantra Ida Bagoes cabang ilmu geografi yang mempelajari tentang penduduk adalah geografi manusia, sedangkan ilmu yang mempelajari tentang kependudukan disebut demografi. Penduduk mempunyai peranan penting dalam pembangunan suatu daerah. Semakin banyak jumlah penduduk maka dapat dikatakan bahwa semakin banyak pula potensi-potensi yang dapat dikembangkan ataupun yang dapat digunakan untuk pembangunan wilayah. (Mantra, 2003)

B. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk merupakan perubahan populasi sewaktu-waktu, dan dapat dihitung sebagai perubahan jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan "per waktu unit" untuk pengukuran. Sebutan pertumbuhan penduduk merujuk pada semua spesies, tapi selalu mengarah pada manusia, dan sering digunakan secara informal untuk sebutan demograf. Pertumbuhan penduduk suatu daerah atau Negara di pengaruhi oleh faktor-faktor kelahiran, kematian, dan faktor perpindahan penduduk. Salah satu komponen yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah kelahiran. (Azano, 2017)

Lincoln (dalam Arsyad, 2004) menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali akan menimbulkan berbagai masalah dan hambatan bagi upaya-upaya yang dilakukan, karena pertumbuhan penduduk yang tinggi tersebut akan menyebabkan cepatnya penambahan jumlah tenaga kerja, sedangkan kemampuan daerah dalam menciptakan kesempatan kerja yang baru sangat terbatas.

Michael (dalam Fitri, 2018) menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk yang terlampaui cepat dipercaya sebagai hampir semua penyebab buruknya ekonomi dan kerawanan sosial. Pertumbuhan penduduk tanpa dibatasi sebagaimana yang tampak sekarang ini, telah dipandang sebagai biang keladi krisis besar yang dihadapi oleh umat manusia dewasa ini. Pertumbuhan ini disebutkan akan menjadi penyebab kemiskinan, rendahnya taraf kehidupan, kekurangan pangan dan rendahnya tingkat kesehatan deglarasi lingkungan, dan masalah-masalah sosial lainnya yang cukup serius.

C. Pengendalian Pertumbuhan Penduduk

Rahma (2016) menyatakan bahwa pengendalian merupakan salah satu bagian dari manajemen. Pengendalian dilakukan dengan tujuan supaya apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga dapat mencapai target maupun tujuan yang ingin dicapai. Kasus-kasus yang banyak terjadi dalam organisasi adalah akibat masih lemahnya pengendalian sehingga terjadi berbagai penyimpangan antara yang direncanakan dengan yang dilaksanakan.

Maka dengan adanya pengendalian, pertumbuhan penduduk dapat dibatasi dengan cara mengurangi jumlah angka kelahiran melalui program KB demi tercapainya tujuan-tujuan yang berkaitan dengan pertumbuhan penduduk. Pengendalian pertumbuhan penduduk ini dilakukan karena terjadinya suatu pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi di suatu Negara maka Pemerintah akan melakukan pengendalian pertumbuhan penduduk. (Rahma, 2016)

Sartika (2012) mengemukakan bahwa program pengendalian penduduk merupakan salah satu strategi dalam mensukseskan pembangunan di Indonesia. Semakin besar jumlah penduduk, maka biaya pembangunan akan semakin tinggi, misalnya untuk subsidi pangan, pendidikan, bahan bakar dan juga subsidi kesehatan. Oleh karena itu pemerintah menggalakkan program KB (keluarga berencana) untuk menekan laju pertumbuhan penduduk.

D. Jenis Pengendalian Penduduk

Menurut Bruce J.Cohen (dalam Muliana, 2015) terdapat beberapa jenis-jenis cara untuk mengendalikan masyarakat, yaitu :

1) Pengendalian Lisan (Pengendalian Sosial Persuasif)

Pengendalian lisan diberikan dengan menggunakan bahasa lisan guna mengajak anggota kelompok sosial untuk mengikuti peraturan yang berlaku.

2) Pengendalian Simbolik (Pengendalian Sosial Persuasif)

Pengendalian simbolik merupakan pengendalian yang dilakukan dengan melalui gambar, tulisan, iklan dan lain-lain.

3) Pengendalian Kekerasan (Pengendalian Koersif)

Pengendalian melalui cara-cara kekerasan adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk membuat si pelanggar jera dan membuatnya tidak berani melakukan kesalahan yang sama.

E. Indikator Pengendalian Pertumbuhan Penduduk

Pengendalian pertumbuhan penduduk menurut Subri (2003) merupakan keseimbangan yang dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Terdapat empat komponen yang mengakibatkan pertumbuhan penduduk yaitu:

- a) Kelahiran (fertilitas);
- b) Kematian (mortalitas);
- c) Migrasi masuk;
- d) dan Migrasi keluar.

1.7 Definisi Konseptual

1. Peran

Peran merupakan suatu fungsi dari suatu individu yang mampu merubah struktur sosial dalam masyarakat. Peran menentukan apa yang diperbuat bagi masyarakat dengan melaksanakan hak dan kewajiban dalam membimbing seseorang dalam kemasyarakatan.

2. Pengendalian Pertumbuhan Penduduk

Pengendalian pertumbuhan penduduk merupakan upaya pemerataan penduduk di suatu wilayah pada perubahan populasi sewaktu-waktu yang disebabkan oleh kelahiran, kematian dan migrasi pada waktu yang tertentu dibandingkan dengan waktu sebelumnya.

1.8 Definisi Operasional

1. Peran
 - a. Wewenang
 - b. Tanggung Jawab
 - c. Kejelasan Tujuan
 - d. Cakupan Pekerjaan
2. Pengendalian Pertumbuhan Penduduk
 - a. Kelahiran
 - b. Kematian
 - c. Migrasi (Masuk dan Keluar)

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan (Hasan, 2002). Sedangkan menurut Arikunto (2002) pengertian lain dari metode penelitian ialah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya, seperti wawancara, observasi, tes maupun dokumentasi.

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. David Williams (dalam Putri, 2013) mendefinisikan metode penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti dan kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka.

Alasan penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif karena pembuatan skripsi yang berjudul Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2018 (Studi kasus : Program Kampung Keluarga Berencana di Kelurahan Prawirodirjan Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta). Dengan judul tersebut nantinya peneliti akan mengetahui dan menjelaskan secara rinci terkait dengan peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui program Kampung KB.

1.9.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian program Kampung Keluarga Berencana (KB) ini berada di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta dan RW 12 Kelurahan Prawirodirjan, Kecamatan Gondomanan. Alasan peneliti memilih Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai tempat penelitian karena Dinas ini menjadi perwakilan pemerintah daerah sebagai pelaksana inovasi dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Kemudian

peneliti juga memilih RW 12 Kelurahan Prawirodirjan, Kecamatan Gondomanan sebagai tempat penelitian karena menjadi kampung pertama yang menjadi Kampung KB diantara 14 Kampung KB yang ada dan masuk kedalam kriteria Kampung KB.

1.9.3 Jenis Data

A. Primer

Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti khusus untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian yang berhubungan dengan program Kampung KB di RW 12 Kelurahan Prawirodirjan, Kecamatan Gondomanan yang diperoleh langsung dari unit analisa yang ada, baik dari hasil wawancara langsung dengan pihak terkait yaitu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta.

B. Sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Data yang dikumpulkan oleh peneliti yang sifatnya cenderung lebih obyektif karena sudah di olah oleh pihak ketiga, yang yang dikumpulkan oleh peneliti dari jurnal, monografi setempat, skripsi, tesis, disertasi, dll.

1.9.4 Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Menurut Sugiyono (2009), pengertian wawancara yaitu digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari narasumber yang lebih mendalam dengan jumlah narasumber sedikit/kecil. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terstruktur karena peneliti menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data yang dicari. Berikut tabel dibawah ini adalah daftar narasumber yang akan dihubungi berkenaan dengan penelitian ini.

Tabel 1. 4 Daftar Narasumber

Narasumber	Jabatan/Instansi	Hal
Ibu Herristanti	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Mengetahui peran dinas dalam pelaksanaan program kampung KB di Kel. Rejowinangun
Ibu Sudaryati	Petugas Lapangan Keluarga Berencana	Mengetahui pengelolaan pelaksanaan kegiatan program KB di Kel. Rejowinangun
Ibu Utami	Ketua Kampung KB RW 12 Kelurahan Prawirodirjan	Mengetahui keterlibatan masyarakat terhadap program Kampung KB yang telah diterapkan
Ibu Sri Subiyanti	Sekretaris RW 12	Mengetahui kegiatan penyuluhan terkait program Kampung KB yang telah diterapkan
Ibu Yeni	Puskesmas Kel. Prawirodirjan	Mengetahui keterlibatan masyarakat dalam pelayanan kontrasepsi KB terhadap program Kampung KB di Puskesmas Kel. Prawirodirjan
Ibu Eni Sumadi	Ketua RT 39	Untuk mengetahui respon masyarakat terhadap program Kampung KB yang ada
Ibu Martini	Ketua UPPKS	Untuk mengetahui respon masyarakat terhadap program Kampung KB yang ada

b) Observasi

Menurut Nawawi dan Martini (dalam Ningrum, 2015) menyatakan bahwa observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada obyek penelitian. Adanya observasi peneliti dapat mengetahui kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menjalankan program Kampung KB di RW 12 Kelurahan Prawirodirjan, Kecamatan Gondomanan. Berdasarkan pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa observasi merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan yang dilakukan oleh peneliti guna menyempurnakan penelitian agar mencapai hasil yang maksimal.

c) Dokumentasi

Dokumen menurut Sugiyono (2009:240), merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang digunakan peneliti disini berupa foto, gambar, serta data-data mengenai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana maupun pustakawan yang didapatkan dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Hasil penelitian ini akan semakin dipercaya dan sah apabila di dukung dengan observasi yang didukung dari observasi dan wawancara akan semakin sah dan dapat dipercaya apabila didukung oleh foto-foto.

1.9.5 Teknik Analisis Data

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data (Data Collection) adalah bagian internal dalam menganalisis data. Kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, menulis memo dan sebagainya dengan tujuan menyisihkan data/informasi yang tidak relevan.

3. Display Data

Display data yaitu pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif ini disajikan dalam bentuk teks naratif.

4. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan

Merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan.